**Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Studi Pada Kecamatan Kiaracondong di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)**

Oleh : Dian Risdiyanto

E-mail : dian.risdiyanto@gmail.com

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

**ABSTRAK**

Judul laporan akhir ini adalah **“Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Studi Pada Kecamatan Kiaracondong di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)”.** Penulis tertarik mengambil judul tersebut dikarenakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan sebuah inovasi dari Pemerintah Kota Bandung yang memberikan manfaat yang besar dan juga membuat masyarakat lebih pro aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta menyeleisaikan permasalahan-permasalahan sendiri.

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program PIPPK di Kota Bandung khususnya di Kecamatan Kiaracondong. Disamping itu juga untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam implentasi PIPPK dan upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kendala yang ada.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah menyeleksi data, klasifikasi data dan verifikasi data. Sumber data digunakan *place, person*, dan *paper.* Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Sejauh ini pelaksanaan Program PIPPK di Kota Bandung sudah cukup baik, tetapi masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif. Kendala yang dihadapi adalah petugas pelaksana PIPPK yang belum sepenuhnya memiliki kapasitas dan kapabilitas bagaimana memahami standar dan syarat-syarat untuk melaksanakan program PIPPK dan prosedur PIPPK masih adanya kekurangan dan permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis mengajukan saran antara lain: mengadakan konsolidasi sesama aparat kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat agar paham dengan adanya program PIPPK.

**Kata Kunci : Implementasi, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan**

***ABSTRACT***

*The title of this final report is* ***"Implementation Regulations of Bandung City Mayor Number 436 Years 2015 About Innovation Program Development and Empowerment of the Cantonal (Studies on the Kiaracondong district in Bandung City West Java Province)"****. The authors interested in taking the title due to Innovation Program development and Empowerment, and village (PIPPK) is an innovation of the Government of the city of Bandung that provides great benefits and also makes the community more pro active in the development and community empowerment as well as fix the problems of its own.*

*This observation aims to find out how the implementation of the program PIPPK in the city of Bandung Kiaracondong district in particular. In addition also to know what obstacles appeared in implantation PIPPK and what is done by the Government of the city of Bandung in overcoming existing barriers.*

*The research method used is descriptive qualitative research method with inductive approach. The data source in the research is primary and secondary data sources. Data analysis technique used is to select the data, classification data and verification of data. The data source used place, person, and paper. Data collection techniques include interviews, observation and documentation.*

*Based on observations in the field, so far the implementation of the PIPPK program in the city of Bandung was already quite good, but still not fully be implemented effectively. Obstacles faced was managing officer PIPPK is not yet fully have the capacity and capability of the standard and how to understand the terms for implementing the programs PIPPK and PIPPK procedures are still the existence of flaws and problems.*

*Based on the results of the research done then authors propose suggestions are convened fellow consolidation apparature subdistrict and socialization to society in order to be familiar with the program PIPPK.*

*Key words:* ***Implementation, Innovation Program Development and Empowerment of the Cantonal***

**1. PENDAHULUAN**

Hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat merupakan komponen yang sangat strategis dan efektif dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan di kewilayahan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan di daerah harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat serta diimplementasikan dengan baik.

Salah satu implementasi yang dilaksanakan yaitu Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIPPK berawal dari pemikiran dan pandangan Walikota Bandung bahwa perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh dengan serta peran aktif dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan PPIPK menjadi ciri khas dalam kebijakan ini, namun dapat dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan latar belakang berpendidikan menjadikan suatu kebijakan dapat terealisasi baik masyarakat maupun aparatur pemerintah kewilayahan. Peran aparat pemerintah diantaranya membina, mengarahkan, dan melakukan pengawasan kepada para pelaksana kegiatan PIPPK.

Tidak semua masyarakat tahu mengenai pelaksanaan PIPPK, sehingga aparat pemerintah kewilayahan dituntut membantu dalam memfasilitasi keperluan pelaksanaan kegiatan. Pembangunan ini tidak hanya membangun dari segi infrastruktur saja, tetapi melainkan membangun karakter masyarakatnya juga agar turut serta andil dalam ikut berperan aktif dan semangat gotong royong. Hal inilah yang masih belum bisa dijalankan oleh para pelaksana.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam pelaksanaan PIPPK di atas salah satunya di Kecamatan Kiaracondong menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemerintah terkhusus Pemerintah Kota Bandung yang dilimpahkan kepada kecamatan ini belum dikatakan telah berjalan secara optimal. Dengan kata lain, Kecamatan Kiaracondong belum dapat mengimplementasikan Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan. Fenomena tersebut melatarbelakangi keterkaitan penulis untuk melakukan pengamatan memalui kegiatan magang mengenai implementasi kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pemerintah.

Untuk itu penulis mengajukan judul “**Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (Studi Pada Kecamatan Kiaracondong di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)”.**

**2. KERANGKA TEORI**

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut :

* 1. Komunikasi

Tiga hal penting dalam proses komunikasi, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

* 1. Sumber-Sumber

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

* 1. Kecenderungan-Kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

* 1. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya. Namun, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi.

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis melihat variabel-variabel tersebut merupakan faktor-faktor internal dalam birokrasi dan aparatur sebagai pelaksana kebijakan. Sehingga dapat dipahami bahwa, Edward III menilai keberhasilan implementasi kebijakan dengan melihat bagaimana implementor/pelaksana kebijakan menyalurkan kebijakan kepada *target group.* Oleh sebab itu penulis berpandangan bahwa model implementasi kebijakan menurut Edward III relevan untuk digunakan dalam pelaksanaan magang tentang Impelementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

**3. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian sebanyak 10 orang. Penelitian menggunakan Teknik triangulasi analasis data yakni dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikembangkan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Analisis Implementasi Peraturan Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Kecamatan Kiaracondong di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat).

* + 1. **Komunikasi**

Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung sudah menindaklanjuti Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 tentang Porgram Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PIPPK) ini. Ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang PIPPK dengan adanya Tim Pengarah dari Pemerintah yang melakukan sosialisi ke tiap-tiap kecamatan, namun Sosialisasi PIPPK kepada staff di kecamatan dan masyarakat ini masih kurang efektif. Pelaksanaan PIPPK ini harus di koordinasikan dulu secara menyeluruh kepada staff Kecamatan Kiaracondong. Ketidaktahuan masyarakat akan adanya PIPPK yang ada di kecamatan Kiaracondong ini disebabkan oleh tidak maksimalnya proses penyampaian informasi atau sosialisasi dari aparat kecamatan kepada masyarakat terkait pelayanan PIPPK.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kota Bandung agar lebih intensif untuk mengkomunikasikan kepada SKPD kecamatan terkait. Agar Seluruh komponen yang terlibat terkait implementasi PIPPK ini mampu menyiapkan dengan baik kepada masyarakat. Kemudian untuk publik atau masyarakat, pemerintah melalui momen-momen lapangan atapun kegiatan kemasyarakatan lainnya agar dapat mensosialisasikan terkait PIPPK ini, sehingga masyarakat dapat mengerti apa itu PIPPK, apa persyaratan kelengkapan, bagaimana prosedur, dan lain-lain, sehingga akan tercipta program PIPPK yang efektif dan sesuai kebutuhan di masyarakat.

1. **Ketersediaan Sumberdaya**

Mengacu pada Perwalkot Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang PIPPK pejabat penyelenggara PIPPK harus memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan PIPPK dengan maksimal.

Analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sumberdaya sudah di komunikasikan baik secara vertikal yaitu kepada Walikota Bandung maupun secara horizontal yakni kecamatan lain untuk saling bantu pegawai (TKK). Dengan segala keterbatasan yang ada namun tidak menjadi halangan untuk penyelenggaraan PIPPK di kecamatan Kiaracondong ini karena sudah di komunikasikan dengan baik. Namun pada pelaksanaannya sumberdaya berupa sarana dan prasarana masih menemui kekurangan. Pada hakikatnya ketika sudah berhubungan dengan masyarakat tidak ada alasan untuk tidak siap. Untuk itu perlu dikomunikasikan dengan baik terlebih dahulu terkait sumberdaya.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran ketersediaan sumberdaya ini harus selalu dikomunikasikan dengan baik. Baik dari sumberdaya berupa sarana dan prasarana maupun sumberdaya manusianya. Agar pelaksanaan PIPPK ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak menemui kendala ataupun hambatan pada saat pelaksanaan.

1. **Sikap dan Tanggap Dari Pihak Yang Terlibat**

Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa terkait tentang sikap dan tanggap dari pihak yang terkait, seluruh aparatur baik dari SKPD terkait maupun kecamatan Kiaracondong sudah siap dan menyambut positif terkait dengan pelaksanaan PIPPK ini.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran pemerintah seharusnya lebih memberikan respon berupa tugas maupun perintah dan petunjuk teknis terkait implementasi PIPPK ini, karena aparatur dan masyarakat sudah siap dan menyambut positif terkait implementasi PIPPK ini.

1. **Struktur Birokrasi**

Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa struktur tim teknis pengelola PIPPK ini sudah berjalan dengan baik, yang para petugas atau struktur timnya dari pegawai di lingkungan kecamatan Kecamatan itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran agar aparatur kecamatan Kiaracondong lebih aktif dan responsif supaya menjalankan tugasnya secara tepat.

1. **Sumber Daya**

Yang terjadi di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan tentang sumber daya khususnya sumberdaya manusia dari segi kuantitas sudah mencukupi namun dari segi kualitas masih terbatas. Namun keterbatasan ini tidak menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Kiaracondong ini.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran untuk peningkatan kualitas sumberdaya, khususnya sumberdaya manusianya. Agar pelaksanaan kebijakan PIPPK ini kepada masyarakat dapat memberikan yang terbaik sehingga akan terwujudnya kebijakan yang efektif dan tepat sasaran penggunaannya.

1. **Kecakapan Pelaksana Kebijakan Publik untuk *Carry Out* Kebijakan Secara Efektif**

Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan kebijakan publik yang efektif, aparatur pemerintah khusunya di kecamatan Kiaracondong harus memiliki pemahaman yang baik dalam menjalankan tugasnya, khusunya dalam mengimplementasikan Perwal Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang PIPPK.

Dalam hasil analisis, penulis memberikan saran agar aparatur pemerintah kecamatan dalam memberikan arahan tentang PIPPK dengan terlebih dahulu diberikan bimbingan teknis, diberikan *drill* atau beri pelajaran tambahan tentang program PIPPK ini. Kemudian Camat Kiaracondong seyogyanya selalu mendorong, memotivasi dan selalu memberikan arahan kepada pegawai atau aparatur kecamatan yang belum mengerti tentang prosedur ataupun perizinan kaitan dengan implementasi PIPPK ini.

1. **Disposisi**

Dalam rangka mengimplementasikan PIPPK kecamatan yang ditetapkan di dalam Perwal Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang PIPPK, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan terkait PIPPK. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, program PIPPK memiliki Keanggotaan Tim Teknis PIPPK terdiri :

1. Walikota Bandung sebagai Pembina
2. Sekretaris Daerah sebagai Ketua
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung sebagai Wakil Ketua
4. Camat Kota Bandung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
5. Lurah Kota Bandung sebagai Pengguna Anggaran
6. Unsur Lainnya sebagai pelaksana

**a. Kesediaan dan Komitmen**

Berdasarkan pada wawancara dengan Inspektur dan Camat Kiaracondong analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa disposisi atau sikap dari para aparatur Kecamatan Kiaracondong selaku pelaksana kebijakan, yakni tentang PIPPK sudah baik. Aparatur Kecamatan Kiaracondong sangat terbuka kepada masyarakat dan tidak menentang maupun mengurangi aturan atau norma yang tertera pada Peraturan Walikota tersebut. Mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya untuk melayani dan mengarahkan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran ketika aparatur kecamatan sudah memberikan sikap yang baik maka seharusnya aparatur kecamatanpun perlu meningkatkan kesungguhan dan tanggungjawab kepada masyarakat.

1. **Struktur Birokrasi**

**a. Kesesuaian Organisasi Birokrasi Yang Menjadi Penyelenggara Kebijakan Publik**

Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan untuk struktur birokrasi di Kecamatan Kiaracondong masih kurang maksimal. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ditetapkan di kecamatan. Namun, Kecamatan Kiaracondong terkait implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 tentang PIPPK berjalan dengan baik, karena untuk kepengurusan PIPPK sendiri hanya instansi kecamatan, kelurahan, dan elemen masyarakat untuk pengawasan dilaksanakan oleh para pengarah dan pembina tentang PIPPK ini dilaksanakan dikantor kecamatan dan kelurahan. Hal ini berarti implementasi program tentang PIPPK sudah berjalan dengan baik, namun struktur birokasi masih kurang atau jauh dari efektif.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran agar segera dibentuk dan ditetapkan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ditetapkan di kecamatan. Sehingga tidak ada pegawai yang rangkap jabatan dan pekerjaannya sehingga program PIPPK dapat berjalan secara efektif dan efesien.

1. **Struktur Jauh Dari Efektif**

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan program PIPPK di kecamatan Kiaracondong ini sudah berjalan dengan baik, meskipun belum ada SK resmi dari Walikota Bandung. Namun itu tidak menjadi suatu kendala atau masalah yang menghambat pelaksanaan program PIPPK ini.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran agar pemerintah Kota Bandung segera membentuk juknis yang resmi dbagi para pelaksana, sehingga pelaksanaan program PIPPK tidak tumpang tindih, lebih efektif dan efesien.

Faktor Pendukung Dan Penghambat yang dilaksanakan di Kecamatan Kiaracondong.

* + - 1. **Faktor Pendukung**

1. **Faktor Pendukung Internal**

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, maka berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung internal yaitu terkait kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu pemerintah Kota Bandung dana yang dianggarkan dan juga aparatur kecamatan itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran perlu ada perhatian penuh dari pemerintah kota baik dari anggaran dan pencairan dana, maupun kemampuan dan kualitas aparatur kecamatan sebagai implementator langsung tentang PIPPK ini.

1. **Faktor Pendukung Eksternal**

Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa mengenai faktor pendukung eksternal adalah masyarakat yang bersedia untuk diatur oleh aparat kecamatan, kemudian paham akan proses pencairan dana PIPPK dengan membawa proposal kegiatan, kelengkapan persyararatannnya dan pengajuan dananya. Pelayanan khususnya tentang PIPPK ini dapat berjalan dengan baik ketika masyarakatnya mendukung dan kooperatif.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran pemerintah harus lebih giat mensosialisasikan tentang PIPPK ini, sehingga masyarakat tahu, dan akan berperan aktif dalam pelaksanaan PIPPK ini.

* + - 1. **Faktor Penghambat**

1. **Faktor Penghambat Internal**

Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa mengenai faktor penghambat yang berasal dari faktor intenal yaitu kemampuan petugas atau aparatur kecamatan dan sarana dan prasana yang kurang mendukung terkait tentang program PIPPK di kecamatan Kiaracondong ini.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran agar pemerintah kota agar lebih memperhatikan dan melakukan peningkatan kualitas aparatur kecamatan maupun sarana prasarana untuk mendukung pelayanan PIPPK di kecamatan Kiaracondong ini.

1. **Faktor Penghambat Eksternal**

Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dari segi eksternal adalah masyarakat yang kurang paham dengan PIPPK, masyarakat yang tidak mau untuk diatur dan diarahkan oleh aparat kecamatan. Ketidaktahuan masyarakat dan kurang pedulinya terhadap kebijakan pemerintah seperti tidak ingin bertanya yang membuat proses pencairan dana, lingkup kegiatan menjadi terganggu dan acap kali persyaratan kurang lengkap yang menghambat program terkait PIPPK di kecamatan Kiaracondong ini.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran kepada masyarakat seharusnya tidak selalu mengeluh meminta haknya saja, tapi juga tahu mekanismenya seperti apa dan melakukan kewajibannya, salah satunya dengan menyiapkan berkas dan persyaratan sehingga dalam pengajuan anggaran kegiatan yang berupa proposal tidak terhambat dalam melaksanakan program PIPPK ini.

Upaya Dalam Menyelesaikan Faktor Penghambat yang dilaksanakan di Kecamatan Kiaracondong.

* 1. **Upaya Peningkatan Langsung Dari Internal**

Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan langsung dari internal adalah dengan memberikan *briefing-briefieng,* rapat koordinasi dengan lurah dan teguran langsung kepada aparatur kecamatan yang bekerja tidak maksimal.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran agar *briefing-briefieng* ataupun teguran langsung kepada aparatur kecamatan yang bekerja tidak maksimal dilakukan secara benar dan berkelanjutan.

* 1. **Upaya Peningkatan Langsung Dari Eksternal**

Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan langsung dari eksternal adalah dengan koordinasi langsung dengan masyarakat, memberikan pemahaman dan sosialisasi bagaimana masyarakat agar ikut mendukung program PIPPK ini.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran aparatur kecamatan dan masyarakat harus bekerja sama dan berperan aktif, sehingga komunikasi dan koordinasi yang terjadi antara aparatur kecamatan dan masyarakat berjalan baik dan efektif.

* 1. **Upaya Peningkatan Tidak Langsung Dari Lingkungan Internal**

Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh kecamatan Kiaracondong secara tidak langsung untuk mengatasi hambatan dari internal adalah dengan memberikan pedoman-pedoman, pengamatan lapangan dan teguran kepada aparatur kecamatan yang menjalankan tugasnya tidak sesuai.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran untuk memberikan pedoman-pedoman, pengamatan lapangan dan teguran kepada aparatur kecamatan yang menjalankan tugasnya tidak sesuai dilakukan dengan baik dan berkelanjutan.

* 1. **Upaya Peningkatan Tidak Langsung Dari Lingkungan Eksternal**

Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh kecamatan Kiaracondong secara tidak langsung untuk mengatasi hambatan dari ekternal adalah dengan memberikan informasi terlebih dahulu tentang alur, persyaratan dan prosedur untuk program PIPPK baik melalui via pengumuman di papan informasi kecamatan Kiaracondong, melalui media cetak atau elektronik dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan saran pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi dan pelayanan haruslah dimanfaatkan dengan baik. Bentuk *fanpage* di media social dan juknis tentang program PIPPK agar masyarakat dapat *Update* tentang program dan kebijakan pemerintah. Seyogyanya program PIPPK dirancang oleh pemerintah Kota Bandung dengan bertujuan dengan menciptakan masyarakat yang pro aktif terhadap wilayahnya, menumbuhkan kembali nilai-nilai gotong royong yang sudah mulai pudar di masyarakat perkotaan dan mensinergikan antara pemerintah Kota Bandung dan masyarakat kota Bandung sehingga pada akhirnya akan menciptakan Kota Bandung sebagai kota yang membuat masyarakatnya ikut berperan dan turut andil dalam proses berkembangnya Kota Bandung yang lebih baik dalam pembangunan, ekonomi, dan social di masyarakat.

1. **KESIMPULAN**
2. Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
3. Komunikasi

* Organisasi

Kecamatan Kiaracondong sudah menindaklanjuti Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 tentang PIPPK. Namun Sosialisasi PIPPK kepada staff di kecamatan dan masyarakat ini masih kurang efektif, ini disebabkan oleh tidak maksimalnya proses penyampaian informasi atau sosialisasi dari aparat kecamatan kepada masyarakat terkait pelayanan PIPPK.

* Ketersediaan Sumber Daya

ketersediaan sumberdaya sudah di komunikasikan baik secara vertikal yaitu kepada Walikota Bandung, dan Tim Pengarah PIPPK maupun secara horizontal yakni kecamatan lain untuk saling bantu pegawai (TKK). Namun masih ada kekurangan dalam sarana dan prasarana berikut dengan Sumber Daya Manusianya.

* Sikap dan Tanggap Dari Pihak Yang terlibat

Seluruh aparatur baik dari SKPD terkait maupun kecamatan Kiaracondong sudah siap dan menyambut positif terkait dengan pelaksanaan PIPPK ini.

* Struktur Birokrasi

Struktur tim teknis pengelola PIPPK di Kecamatan Kiaracondong ini sudah berjalan dengan baik, yang para petugas atau struktur timnya dari pegawai di lingkungan kecamatan Kiaracondong itu sendiri.

1. Sumber daya

* Sumber Daya Pendukung Khusunya Sumber Daya Manusia

sumberdaya manusia dari segi kuantitas sudah mencukupi namun dari segi kualitas masih terbatas.

* Kecakapan Pelaksana Kebijakan Publik untuk *Carry Out* Kebijakan Secara Efektif

1. Disposisi

* Kesediaan dan Komitmen

1. Struktur Birokrasi

* Kesesuaian Organisasi Birokrasi Yang Menjadi Penyelenggara Kebijakan Publik

Struktur birokrasi di Kecamatan Kiaracondong masih kurang maksimal. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ditetapkan di kecamatan.

1. Faktor Pendukung Dan Penghambat
2. Faktor Pendukung

* Faktor Pendukung Internal : dana yang dianggarkan dan juga aparatur kecamatan itu sendiri.
* Faktor Pendukung Eksternal :masyarakat itu sendiri

1. Faktor Penghambat

* Faktor Penghambat Internal :kemampuan petugas atau aparatur kecamatan dan sarana dan prasana yang kurang mendukung terkait tentang program PIPPK di kecamatan Kiaracondong ini.
* Faktor Penghambat Eksternal :masyarakat itu sendiri.

1. Upaya Dalam Menyelesaikan Faktor Penghambat

* Upaya Peningkatan Langsung Dari Internal :dengan memberikan *briefing-briefieng* ataupun teguran langsung kepada aparatur kecamatan yang bekerja tidak maksimal.
* Upaya Peningkatan Langsung Dari Eksternal :dengan berhadapan langsung dengan masyarakat, memberikan pemahaman dan sosialisasi bagaimana masyarakat agar ikut mendukung program PIPPK ini.
* Upaya Peningkatan Tidak Langsung Dari Lingkungan Internal : dengan memberikan pedoman-pedoman, pengamatan lapangan dan teguran kepada aparatur kecamatan yang menjalankan tugasnya tidak sesuai.
* Upaya Peningkatan Tidak Langsung Dari Lingkungan Eksternal : dengan memberikan informasi terlebih dahulu tentang alur, persyaratan dan prosedur untuk program PIPPK ini baik melalui via pengumuman di papan informasi kecamatan Kiaracondong, melalui surat kabar, media social dan aplikasi lain sebagainya.

.